

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MODAL SOSIAL PEMBANGUNAN

Bernardus Renwarin

Abstrak: Local wisdom is a worldview which has been practiced for such a long time by certain communities. As wisdom, it remains to be a trusted moral principle, and it sustains the idea and hope of social peace, stability and happiness. To put briefly it is a social capital. However, the world keeps changing. In the world deluged by amount of information, wisdom is provided and easily extracted from everywhere. This prompts a question of the effectiveness of local wisdom to be one of central moral guidance of social development. The question is whether the local wisdom is still effective to be a social capital for this sort of world. This article aims at exploring the possibility of it. It's argued that current development is wrongly taken which brings about manipulation and exploitation. In this problem, the sustainable development is at risk. Here, the local wisdom has plenty of teachings to support sustainable development.

Kata-Kata Kunci: social capital• local wisdom• worldview• sustainable development• social and productive functions• values and norms• networking• trust and hope• criteria• knowledge and culture•



Pendahuluan

Kajian tentang kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat dalam pembangunan pada tulisan ini merupakan sebuah refleksi mengenai makna nilai-nilai yang hidup pada suatu masyarakat yang secara kultural dan bersifat etis hidup secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Hal ini dapat ditemukan dalam sejarah dan tradisi hidup masyarakat baik di Papua maupun di daerah-daerah lain di Indonesia. Sebagai contoh pada kesempatan ini hanya diangkat kearifan lokal dari pengalaman Orang Dayak di Kalimantan Tengah, daerah Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom Papua.

Nilai-nilai hidup masyarakat sebagai suatu komunitas lokal pada umumnya merupakan hasil dari proses sosialisasi berkelanjutan secara turun-temurun dan dipelihara sebagai pegangan hidup dan modal sosial manusia, yang mengarahkan serta mengatur pikiran, perasaan dan tindakan

bahkan sebagai alat evaluasi perilaku hidup manusia yang mengkristal dalam kemasan yang disebut *world view*. Itulah sebabnya tulisan ini ingin menyoroti kearifan lokal sebagai bagian dari *world view* dan dapat dilihat sebagai suatu aset atau sumber daya sosial masyarakat yang dapat berfungsi sebagai sarana dan basis modal manusia dalam pengembangan hidup bersama suatu komunitas karena ia bukan merupakan sekedar suatu tradisi, yang dapat dipandang sebelah mata. Kearifan lokal merupakan modal manusia atau modal sosial yang tentu mengandung pengetahuan lokal, kearifan lokal, ketrampilan-ketrampilan lokal yang patut diperhitungkan sebagai salah satu basis alternatif pendekatan pembangunan. Maka penjelasan mengenai pokok di atas diawali dengan ulasan mengenai arti dan fungsi modal sosial, kemudian dilanjutkan dengan uraian tentang kearifan lokal. Akhirnya dibuat suatu catatan untuk melihat bagaimana relevansi, makna dan peran kearifan lokal sebagai kapital sosial pembangunan masyarakat.

Modal Sosial/ *Social Capital*²³

Dalam studinya tentang *social capital*, Robert M. Z. Lawang (2005:8), Guru Besar Sosiologi Universitas Indonesia di Jakarta, menyatakan bahwa penggunaan istilah *social capital* atau kapital sosial bisa dilihat dalam pengertian yang bersifat ekonomis dan sosiologis. Terkait dengan perspektif-perspektif tersebut, dikenal berbagai istilah seperti, kapital finansial, barang kapital fisik, kapital manusia, kapital personal, kapital politik, kapital budaya²⁴ dan sebagainya. Dalam sumber lain istilah *capital* diterjemahkan dengan modal, sehingga kita temukan istilah modal manusia (*human capital*), seperti pengetahuan, keahlian, kemampuan kerja; ada pula yang disebut modal fisik (*physical capital*) seperti, perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, infrastruktur dasar; selain itu terdapat juga apa yang disebut modal finansial (*financial capital*), seperti penghasilan, tabungan, sertifikat, surat berharga, saham dan sebagainya; kemudian terdapat pula modal teknologi (*technological capital*) seperti, teknologi pangan, teknologi pengairan, teknologi komunikasi, teknologi pengukur jarak, cuaca dan sebagainya; ada lagi yang disebut modal lingkungan (*environmental capital*), misalnya sumber

²³Menurut Robert M.Z. Lawang (2005: 4-6) istilah *social capital* secara konseptual sebaiknya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah **modal sosial** karena penggunaan kata modal sering mengandung arti yang bias, seperti “modal dengkul”. Sekali pun demikian dalam tulisan ini kami cenderung menggunakan istilah *social capital* dengan kata modal sosial.

²⁴ Penjelasan mengenai arti jenis-jenis kapital yang disebut di atas dapat dibaca dalam tulisan Robert M. 2005. Lawang, *Kapital Sosial, dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*, Cetakan kedua, FISIP UI PRESS, Jakarta, hlm. 9-27.

daya alam, sumber daya hayati dan sebagainya (*Sadhana*, Edisi/Tahun: 264/2011: 12-13).

Dalam tulisan ini kami menggunakan istilah *social capital* dengan modal sosial walaupun dalam perspektif sosiologis Lawang. Lawang (2005, 30-44) menjelaskan bahwa penggunaan istilah modal bisa mempunyai makna yang bias sehingga ia tetap menggunakan istilah kapital sosial. Selanjutnya dikatakan bahwa kata sifat sosial dalam kapital sosial (baca : modal sosial) mempunyai makna positif karena kapital sosial harus mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dan membuat pertumbuhan tersebut berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, baik masyarakat yang ada dalam lingkaran jaringan kelompok tertentu maupun masyarakat luas. Dikatakannya bahwa sifat sosial dalam kapital sosial dilihat berdasarkan kriteria-kriteria berikut. Pertama, sifat sosial pada kapital sosial berhubungan dengan **fungsi produktif**, karena berkaitan langsung dengan aspek efisiensi dan efektifitas. Kedua, **fungsi sosial** mengacu pada aspek struktural, aspek relasional, aspek kognitif dan aspek asosiatif.

Selanjutnya, Lawang menyebut juga beberapa kriteria kapital sosial yang dilihat secara sosiologis, berisikan kriteria ekonomis, kriteria struktural, kriteria relasional, kriteria kognitif, kriteria asosiatif. Berikut ini akan dijelaskan apa isi kriteria-kriteria kapital sosial atau modal sosial tersebut (Bdk. Ben Fine, 2001: 175-178 dan Francis Fukuyuma, 2005: 24-30). Untuk memperjelas kriteria-kriteria kapital sosial tersebut di atas berikut ini dibuatkan penjelasan singkat sebagai berikut.

Pertama, kriteria ekonomis. Kriteria ini mengandung ciri produktifitas, efisiensi dan efektifitas. Ada dua asumsi penting yang melatarbelakangi penjelasan ini : (i) kapital sosial berhubungan dengan struktur sosial. Struktur sosial selalu berkaitan dengan relasi, jaringan, kewajiban, harapan yang menghasilkan dan dihasilkan oleh kepercayaan dan sifat dapat dipercayai yang berkembang di antara orang-orang yang berhubungan itu; (ii) kapital sosial berfungsi untuk mencapai tujuan ekonomik, yakni fungsi memperlancar dan fungsi mempererat ikatan-ikatan sosial dalam sistem produksi.

Kedua, kriteria struktural. Lawang menjelaskan secara singkat tentang struktur sosial dengan pengertian (a) status-peran dan kaitannya dengan relasi, norma dan sanksi. (b) institusi sosial yang mencakup tiga komponen utama: kebutuhan dasar masyarakat, cara untuk mencapai kebutuhan itu serta nilai dan norma. (c) struktur sosial juga dapat dilihat dalam struktur yang bersifat makro, yaitu stratifikasi sosial. Di sini

masyarakat diatur secara berjenjang menurut kekuasaan, privilese dan prestise. Bila kapital sosial terikat pada struktur-struktur sosial yang terinstitusionalisasikan dalam kelas-kelas masyarakat, itu bukan kapital sosial. Struktur-struktur sosial yang dilihat sebagai kapital sosial adalah struktur sosial yang merupakan proses produksi dari interaksi sosial yang menghasilkan hubungan, jaringan sosial yang bersifat efisien dan efektif.

Ketiga, kriteria relasional. Kriteria ini tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial karena dalam struktur sosial diatur hubungan antara status dan perannya masing-masing dan hubungan itulah yang menentukan keberadaan struktur tertentu. Walaupun status lebih bersifat statis tetapi status mempunyai sifat relasional karena di dalamnya terkandung peran yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, aspek dinamis dalam kapital sosial menunjukkan adanya suatu proses dan bukan hanya sebagai jaringan atau hubungan. Dalam aspek relasional ada proses dan dinamika sebagai elemen penting dalam teori kapital sosial karena di situlah terdapat unsur-unsur seperti kepercayaan, harapan dan keyakinan. Jadi relasi yang mengandung aspek saling menguntungkan kedua belah pihak, menimbulkan adanya kepastian sebagai hasil dari suatu harapan dan kepercayaan dari suatu interaksi sosial. Apa yang dijelaskan Lawang ini dapat dikatakan relevan dengan pemikiran Bourdieu. Menurut Bourdieu (dalam Field, 2010: 21-25), kapital sosial merupakan modal hubungan sosial yang dapat memberikan “dukungan-dukungan” bermanfaat bahkan dapat membawa orang ke dalam posisi-posisi yang penting secara sosial.

Keempat, kriteria kognitif berhubungan dengan aspek struktural. Pilihan-pilihan yang dibuat seseorang biasanya merupakan hasil dari keputusan pilihan rasional individu atas tawaran-tawaran yang dibuat oleh struktur sosial. Itulah sebabnya keputusan rasional individu yang dibuat tersebut sesungguhnya dilatarbelakangi oleh peran pengetahuan dan pengalaman individu. Perbedaan kognisi seperti itu tentu ada di antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya seperti yang pada umumnya ditemukan di antara masyarakat yang dikategorikan maju dan masyarakat yang dikategorikan terbelakang.

Kelima, kriteria asosiatif. Lawang melihat bahwa kapital sosial akan semakin kuat dan besar bila dalam hubungan yang bersifat struktural mengacu pada kerjasama dan saling memberi informasi tentang hal-hal yang terkait dengan dunia usaha. Dengan demikian hubungan-hubungan yang dibangun tersebut secara *asosiatif* bersifat *resiprositi*, saling menguntungkan, *altruistik*, kebersamaan, kreatif, partisipasi, kerjasama, memotivasi,

emansipatoris, keutungan bersama dan berorientasi ke depan. Di sini muncul pertanyaan apakah kapital sosial hanya dipengaruhi oleh struktur yang *asosiatif* atau juga oleh struktur yang bersifat *disosiatif* seperti konflik? Menurut Lawang, secara sosiologis kapital sosial terkait juga pada struktur yang bersifat *disosiatif* seperti konflik, karena konflik merupakan suatu pendekatan sosiologis untuk memperoleh konsensus dan juga demi terjadinya integrasi sosial. Hal tersebut dapat dilihat juga pada gagasan James Coleman (dalam Field, 2011: 32-39) yang mengartikan kapital sosial sebagai seperangkat sumber daya yang melekat pada hubungan dalam keluarga, organisasi sosial dan komunitas, yang dapat mendorong orang bekerja sama karena ada rasa saling percaya dan kesadaran akan adanya nilai-nilai bersama. Jadi Coleman memandang hubungan antaraktor merupakan modal yang membantu menciptakan kewajiban dan harapan, membangun kejujuran lingkungan sosial, membuka saluran informasi dan menetapkan norma yang menopang perilaku hidup dan mengandung sanksi pula antaraktor.

Sehubungan dengan hal tersebut Lawang (2005: 42-44) mencatat pendapat beberapa pemikir kapital sosial yang menyatakan bahwa kapital sosial bukan sesuatu yang berdiri sendiri melainkan tertambat atau berada dalam hubungan dan jaringan antarmanusia sebagai suatu kepercayaan dan kepatuhan pada norma yang mempunyai kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kegiatan lainnya yang menyatu baik pada individu maupun masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh. Akan tetapi kemudian muncul pertanyaan, apa saja yang menjadi konsep-konsep utama dalam memahami kapital sosial? Menurut Lawang (2005: 45-70) konsep-konsep inti dalam memahami kapital sosial adalah konsep tentang **kepercayaan**, **norma** dan **jaringan**. Sebelum melihat lebih jauh isi dari kapital sosial perlu disimak beberapa pemikiran lain tentang modal sosial seperti yang dikemukakan oleh Bourdieu, Coleman dan Putnam (dalam Field, 2010: 21-65).

Dalam catatan Field terungkap bahwa Bourdieu kemudian merumuskan kapital sosialnya sebagai berikut :

kapital sosial adalah sejumlah sumber daya, aktual atau maya yang berkumpul pada seseorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan.

Menurut Bourdieu, kapital sosial harus dilihat sebagai satu-satunya cara untuk menjabarkan prinsip-prinsip asset sosial karena modal sosial memuat sumber daya aktual yang potensial dan bertahan dalam waktu yang lama. Menurutnya hubungan-hubungan sosial sebenarnya berfungsi sebagai

strategi investasi dalam usaha membangun kapital lainnya. Pandangan Bourdieu ini lebih terarah pada kelompok yang memiliki kemampuan material dan kekayaan memadai atau orang-orang yang memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat. Sementara Coleman berpikir sebaliknya. Menurut Coleman, modal sosial merupakan representasi sumber daya yang mengandung harapan akan adanya proses resiprositas yang melampaui individu-individu sehingga melibatkan jaringan-jaringan yang lebih luas yang hubungan-hubungannya diatur oleh tingkat kepercayaan dan nilai-nilai bersama. Oleh sebab itu, ia melihat kapital sosial sebagai sumber yang bermanfaat yang tersedia bagi aktor melalui hubungan sosialnya. Jadi modal sosial bagi Coleman bukan merupakan barang pribadi yang melekat pada individu melainkan merupakan bagian dari mereka yang berusaha mewujudkannya dan juga bagian dari mereka yang ada dalam struktur tersebut. Ia melihat kapital sosial selain sebagai seperangkat sumber daya keluarga, organisasi sosial atau komunitas bagi perkembangan kognitif dan sosial, juga mengandung norma dan merupakan jaringan sosial yang di dalamnya diatur hak dan kewajiban serta harapan bersama. Apa yang terkandung dalam pemikiran Coleman ialah bahwa kapital sosial merupakan sarana untuk menjelaskan bagaimana orang berusaha bekerja sama dan mempunyai kontribusi bagi pembangunan modal manusia. Karena menurutnya kekerabatan dan keluarga merupakan representasi dari hakekat masyarakat dan ia amat pesimis dengan masa depan kontrol sosial dalam tatanan yang bersifat artifisial. Pikiran di atas juga sejalan dengan apa yang diangkat oleh Field (2010: 46-51) terkait dengan definisi Putnam tentang modal sosial,²⁵ yang dirumuskan sebagai berikut:

Modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipasi bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Menurut Field, Putnam kemudian melihat bahwa inti modal sosial adalah adanya jaringan sosial. Jaringan tersebut memiliki nilai dan dalam jaringan tersebut ada kontak sosial yang mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Menurut Putnam sebagaimana dikutip Field, hubungan individu, jaringan sosial dan norma resiprositas serta kepercayaan tumbuh dari hubungan-hubungan antarindividu dan kelompok.

Selanjutnya perlu dilihat ketiga unsur utama yang terdapat pada modal sosial, yaitu kepercayaan, jaringan dan norma. Ada tiga hal penting

²⁵Judul asli buku John Field, *Social Capital*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, cetakan pertama tahun 2010 dengan judul Modal Sosial.

terkait dengan perihal **kepercayaan**, yaitu : (1) hubungan sosial antardua atau lebih orang, termasuk hubungan dalam institusi; (2) harapan yang terkandung dalam hubungan itu, yang bila direalisasikan akan menguntungkan kedua belah pihak yang berhubungan; (3) interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan terwujud. Oleh karena itu, dikatakan oleh Lawang yang mengutip Mohllering, bahwa semakin tinggi sikap saling percaya antara orang yang bekerjasama, semakin kurang risiko dan biaya yang ditanggung. Yang perlu disadari ialah bahwa harapan bukan suatu kepastian karena itu dibutuhkan suatu keberanian untuk mengambil risiko seperti sikap orang yang berwirausaha. Akan tetapi seperti yang diungkapkan oleh Torsvik sebagaimana dicatat oleh Lawang bahwa dalam kepercayaan terkandung harapan akan tindakan orang lain sebagai tindakan yang baik bagi kita dan dengan demikian berkuranglah resiko yang akan terjadi akibat tindakan-tindakan yang dilakukan. Selain itu, Lawang (2005: 50-60) juga menjelaskan bagaimana Mollering mengaitkan pikiran Simmel tentang fungsi konsep kepercayaan, sebagai berikut:

tanpa adanya saling percaya yang merata antara satu orang dengan orang lainnya, masyarakat itu sendiri akan disintegratif dan kepercayaan itu merupakan salah satu kekuatan sintetik yang paling penting dalam masyarakat.

Dengan kata lain kepercayaan merupakan asset atau kekuatan yang mengintegrasikan masyarakat. Maka dalam kaitan dengan konsep fungsi kepercayaan, dikatakan oleh Lawang bahwa Simmel menyebut ada beberapa bentuk kepercayaan yang bersifat timbal-balik dalam masyarakat. Bentuk kepercayaan yang pertama ialah uang yang bersifat material dan bersifat kredit.²⁶ Bentuk kepercayaan kedua yang dijelaskan oleh Simmel, menurut Lawang adalah *confidence*. Bentuk kepercayaan ini dilatarbelakangi oleh sejauh mana seseorang tahu tentang orang lain dan menjadi alasan untuk membangun hubungan saling percaya. Kemudian bentuk kepercayaan yang ketiga ialah bentuk masyarakat rahasia (*secret society*).²⁷ Dalam jenis masyarakat ini ada kepercayaan timbal-balik antara anggota di mana *confidence* diperlukan sekali karena tujuan utama kerahasiaan adalah

²⁶Kata kredit berasal dari kata *credere* (Latin) yang berarti percaya. Lawang menjelaskan bahwa istilah kredit mengandung unsur kepercayaan yang sangat kental di mana ada jaminan bahwa uang yang dipinjam “pasti” akan dikembalikan. Di sini kepercayaan yang ada dibangun setelah diperhitungan akan ada pengembalian.

²⁷Menurut Michael Bradly (2008), ada 21 *secret societies* yang hidup di dunia hingga sekarang ini sebagai Organisasi Perusak Dunia.

perlindungan. Yang perlu disimak dengan baik dalam pembahasan ini ialah bahwa perspektif Simmel tentang “kepercayaan” sebenarnya mau dilihat sebagai bentuk hubungan yang disebutnya **pertukaran sosial** dan dalam situasi di mana terdapat **kerahasiaan yang dilindungi**.

Setelah berbicara mengenai unsur kepercayaan dalam modal sosial, perlu dilihat pula unsur kedua ialah perihal **jaringan**. Ada beberapa pengertian tentang jaringan yang digunakan dalam teori kapital. Jaringan bisa diartikan sebagai adanya hubungan sosial yang diikat dengan kepercayaan berdasarkan norma-norma tertentu baik dalam arti strategik maupun dalam arti moral. Selain itu, jaringan juga dimengerti sebagai hubungan sosial yang berbentuk kerjasama di mana ada kepercayaan interpersonal yang bersifat simbiotik sebagai salah satu unsur penting di dalamnya. Adapun, Francis Fukuyuma (2005: 243-248), merumuskan pengertian jaringan sebagai berikut:

Jaringan ialah sekelompok orang yang memiliki norma-norma atau nilai-nilai informal di samping norma-norma atau nilai-nilai yang diperlukan untuk transaksi biasa di pasar.

Apa yang dijelaskan Fukuyuma dalam rumusannya tentang jaringan mengindikasikan bahwa norma dan nilai yang dimaksud meliputi nilai-nilai baik yang terkait dengan hubungan sosial antarpribadi maupun sistem nilai yang lebih kompleks seperti nilai-nilai dalam agama dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi-organisasi nasional dan internasional. Jadi nilai-nilai tersebut tidak sekedar berkaitan dengan kepentingan ekonomi pribadi semata. Fukuyuma (2005: 18-24) berpendapat demikian karena ia melihat modal sosial sebagai seperangkat nilai dan norma informal yang dimiliki bersama dalam suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerja sama di antara anggota karena hubungan mereka dibangun berdasarkan sikap saling percaya satu terhadap yang lain.

Yang menjadi pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana jaringan itu dibentuk dan bentuk jaringan itu seperti apa? Jaringan yang ada selalu terjadi antarpersonal dan bisa berbentuk duaan, tigaan dan seterusnya. Jaringan-jaringan tersebut membentuk strukturnya sendiri sehingga terbentuklah jaringan antarpersonal, jaringan antara individu dan institusi serta jaringan antarinstansi. Dari sisi sifat jaringan, bisa positif dan negatif, bisa tertutup dan terbuka. serta mempunyai makna ekonomis serta sosial. Makna ekonomis menunjuk pada produktivitas, efisiensi dan efektivitas sedangkan fungsi sosial ditandai oleh adanya dampak pada partisipasi dan kebersamaan yang diperoleh dari pertumbuhan ekonomi. Dari segi fungsi,



jaringan mempunyai fungsi informatif, koordinatif, fungsi katalisator dan fungsi akses. Unsur ketiga, ialah adanya **norma**. Norma tidak bisa dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Norma muncul dari pertukaran sosial yang saling menguntungkan sehingga ia bersifat resiprokal. Norma berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak baik yang dapat menjamin keuntungan maupun yang menimbulkan adanya sanksi karena terjadi pelanggaran dan ketidakadilan.

Setelah dibuat penjelasan berupa pokok-pokok pikiran mengenai modal sosial sebagaimana diuraikan di atas, berikut akan dibahas secara singkat pemahaman mengenai kearifan lokal dan kemungkinan memosisikannya sebagai modal sosial.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal tidak dapat dibicarakan terlepas dari tinjauan yang terkait dengan *world view* masyarakat. Karena itu, pada bagian ini akan dibicarakan beberapa pandangan hidup atau *world view* masyarakat yang berisikan kearifan-kearifan tertentu yang turun-temurun dipakai sebagai acuan dan sumber norma, yang berisikan kepercayaan di antara masyarakat untuk mengatur hidup mereka baik sebagai individu maupun sebagai suatu komunitas. Di sini digunakan istilah **kearifan setempat** atau **kearifan lokal** sebagai padanan kata dari **kearifan tradisional**. Menurut Hariadi Kartodiharjo dan Hira Jhamtani:

kearifan tradisional merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu, mencakup model-model pengelolaan sumberdaya alam secara lestari termasuk bagaimana menjaga hubungan dengan alam melalui pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab (*Editors*, 2006: 175-187).

Dari rumusan di atas terlihat dengan jelas bahwa kearifan masyarakat atau kearifan lokal berisikan pengetahuan dan nilai-nilai hidup yang mengatur bagaimana hubungan antarmanusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dihidupi secara arif. Di bagian lain Keraf menyatakan bahwa:

kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis (2006: 279-307).

Pernyataan serupa diungkapkan juga oleh Rachmad K. Dwi Susilo dalam studinya yang diterbitkan dalam buku yang berjudul Sosiologi



Lingkungan (2008: 157-167), yang menguraikan bahwa perlu melembagakan kembali kearifan-kearifan lokal tradisional, karena kearifan mempunyai fungsi membantu menyelamatkan lingkungan ekologis setempat. Ada begitu banyak kearifan lokal masyarakat yang bisa ditemukan namun pada kesempatan ini hanya ditampilkan beberapa contoh kearifan lokal masyarakat, khususnya kearifan lokal orang Dayak, orang Badui dan orang Papua.

Kearifan Lokal Orang Dayak

Pada *Kompas* (Sabtu, 11 Juni 2011) dikisahkan bahwa di masa lalu masyarakat Dayak mempunyai kebiasaan yang membanggakan keluarga bila seorang laki-laki bisa memperoleh hewan buruan di hutan untuk kebutuhan lauk keluarga dengan cara menyumpit atau *manyipet*. Praktek menyumpit tersebut sampai sekarang masih dilakukan orang Dayak, sebagaimana dituturkan oleh Undong, warga Desa Sungai Lunuk, Kecamatan Tanah Siang, Murung Raya, Kalimantan Tengah. Memang penggunaan sumpit atau sepit kini bukan merupakan satu-satunya alat berburu yang diandalkan tetapi baik laki-laki maupun perempuan masih menggunakannya jika mereka pergi ke ladang atau ke hutan. Bagi orang Dayak, sumpit sebagai alat berfungsi hanya untuk berburu binatang atau dipakai hanya untuk menyumpit buruan di hutan yang nantinya dibawa pulang sebagai lauk bagi keluarga. Sebagaimana diulas Kompas bahwa hasil buruan bisa berupa burung, rusa, babi, tupai dan lain-lain. Salah satu kearifan masyarakat Dayak menggunakan sumpit sebagai alat berburu terlihat dari cara mereka memfungsikannya dengan tepat dan bertanggung jawab karena dengan alat tersebut mereka hanya mencari hasil buruan yang disukai sebagai bahan lauk keluarga. Artinya para penyumpit dengan sikap yang arif dan selektif menyumpit hanya binatang yang pada saat itu dicarinya dan yang diinginkan tanpa mengusik keberadaan binatang yang lain. Dengan demikian binatang yang tidak terkena sumpit terbebaskan dari ancaman perburuan dan sumpitan orang Dayak.

Seperti diulas di *Kompas* bahwa kelebihan alat sumpit ialah bahwa pada bagian ujung yang lancip sebagai anak sumpit mengandung racun yang mematikan dari jenis tumbuhan yang biasa dipakai masyarakat Dayak ketika berburu binatang. Oleh karena itu, di masa lalu para serdadu Belanda takut terkena sumpitan oleh orang Dayak, karena sumpitan tersebut mengandung racun yang mematikan. Itulah sebabnya bagi orang Dayak berlaku suatu hukum bersama sebagai wujud kearifan setempat yang selalu dipatuhi ialah sumpit tersebut tidak boleh digunakan untuk menyumpit manusia atau



membunuh manusia karena apabila sumpit beracun itu dipakai menyumpit manusia maka khasiat racun yang ada pada sumpit tersebut akan hilang.

Kearifan lain yang terkandung dalam proses pembuatan sumpit ialah orang yang membuat sumpit hendaknya telaten dan sabar sebagaimana terlihat dari laras sumpit yang panjang dan lurus. Makna yang diperoleh ialah bahwa ketika orang Dayak sedang bekerja atau berusaha melakukan sesuatu ia harus selalu “berpikir lurus”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sejak dahulu kala telah berkembang sebuah tradisi dalam kehidupan komunitas orang Dayak yang berisikan kesepakatan bersama mengenai bagaimana memfungsikan sumpit sebagai alat berburu dengan cara yang baik dan benar dan bukan sebagai alat pemusnah, perusak satwa dan lingkungan atau pembunuh manusia.

Dalam perkembangan saat ini memang sumpit bukan lagi satu-satunya alat berburu untuk mencari nafkah tetapi dipakai sebagai alat rekreasi ketika mereka berlandang atau pergi ke hutan karena berbagai lauk yang dibutuhkan masyarakat sebagai bahan konsumsi dapat ditemukan di pasar atau kios-kios dan sebagainya. Di sinilah dapat dilihat bahwa kearifan setempat atau lokal ternyata mengandung unsur-unsur modal sosial seperti kepercayaan di antara masyarakat pemegang tradisi sumpit saling menghormati dan mempertaruhkan harapan di antara mereka untuk tidak menyalahgunakan sumpit. Kemudian terkandung pula norma-norma yang harus dipatuhi bersama dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keserasian relasi sosial budaya masyarakat. Dan akhirnya kearifan orang Dayak mengandung unsur jaringan di mana mereka berelasi satu sama lain untuk memperjuangkan suatu keadaan hidup bersama yang lebih baik. Dengan demikian kearifan setempat seperti ini dapat menjadi sebuah modal sosial yang bisa menghasilkan suatu modal budaya sebagai kekayaan masyarakat setempat.

Kearifan Lokal Orang Arso

Berbicara mengenai kearifan masyarakat asli Papua khususnya orang Arso, tentu tidak bisa dilepas dari berbicara mengenai beberapa sikap dasar masyarakat setempat yang berkaitan dengan cara pandang, cara bertingkah laku dan cara bertutur kata serta cara merasa sebagai suatu komunitas etnik atau kelompok suku dalam suatu masyarakat, terkait dengan unsur persekutuan, persaudaraan, pertukaran sosial dan kehidupan hariannya. Dengan kata lain kearifan masyarakat setempat tidak dapat dipisahkan dari *world view* mereka. Berdasarkan pengertian di atas kearifan tradisional atau kearifan lokal dilihat sebagai suatu sistem pengetahuan yang melembaga



pada suatu budaya dalam mengelola alam dan hidup. Bagaimana sesungguhnya kearifan lokal bisa dilihat dalam kehidupan orang Papua pada umumnya dan secara khusus dalam kehidupan orang Arso?

Kearifan orang Arso antara lain dapat dilihat dari tradisi mereka berburu, menangkap ikan di sungai atau menebang pohon. Semua kegiatan itu dilakukan terbatas pada wilayah hutan dan tanah milik klen atau keluarga dan semuanya diambil secukupnya hanya untuk digunakan oleh keluarga di kampung dan tidak bersifat eksploitatif (Bdk. Patai, 2005: 23-24 dan Malak, 2006: 188-198). Sesungguhnya orang Arso mengenal sistem pembagian tata ruang tentang alam dan lingkungan tempat manusia beraktifitas dan mencari nafkah, sebagai berikut: *Na Numui* (dusun sagu), *Ma Disih* (hutan tempat berburu binatang, *Ma Mandap* (tempat berkebun) dan *Ubyagey* (kali atau telaga, tempat mencari dan menangkap ikan). Jika mereka melakukan kegiatan dan diperkirakan akan melewati daerah atau dusun milik orang lain, biasanya akan meminta izin terlebih dahulu. Demikian juga bila dalam keadaan tertentu kegiatan berburu di hutan ternyata melampaui dusun atau wilayah orang lain, sepulangnya di kampung akan diberitahu kepada pemilik hutan atau dusun yang telah dilanggar oleh yang melakukan perburuan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pola hidup mereka yang secara ekonomis bersifat subsisten sebagai pemburu dan peramu. (Bdk. Boelaars: 1986, 23-34; Lihat juga, Purba, *Penyunting*, 2002: 44-52). Sikap menghargai hak milik orang lain, tidak boros dan tidak eksploitatif serta ramah lingkungan, merupakan kearifan masyarakat yang ada sejak dulu dalam tradisi hidup orang Arso dan orang Papua pada umumnya yang hingga saat ini masih dipraktekkan di banyak tempat di Papua.

Kearifan masyarakat mengelola sumber daya hutan subsistensi juga terkait langsung dengan pemahaman mereka tentang fungsi hutan sebagai pusat kehidupan **ekonomi**, yang juga sekaligus bermakna **sosial** dan **keagamaan** serta **pendidikan** yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan relasi di antara berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan demikian aktivitas subsistensi yang tidak boros dan tidak rakus serta tidak eksploitatif memungkinkannya tetap menghargai keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Upaya untuk mewariskan nilai-nilai hidup yang baik melalui sikap melestarikan alam dan memelihara serta mengembangkan hubungan **sosial** yang baik dengan orang lain, bagi orang Papua pada umumnya dan secara khusus bagi orang Arso sebenarnya dilakukan melalui masa **pendidikan** yang disebut masa *inisiiasi*. Pada masa ini seorang anak laki-laki remaja yang matang akan dididik dan ditetapkan sebagai orang dewasa.



Sebagai orang dewasa, ia mempunyai tanggung jawab dan kemampuan, antara lain trampil berburu binatang serta mampu bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Jadi, inisiasi sebagai masa pendidikan bagi orang asli Arso sesungguhnya merupakan suatu kekuatan moral dan sosial untuk tetap melestarikan nilai-nilai hidup yang baik dan mengalihkan tanggung jawab seseorang sebagai anak remaja menjadi seorang laki-laki dewasa, agar tahu apa yang harus dilakukan secara bertanggungjawab sebagai orang yang dewasa (Gusbager, 2001, 27-56).

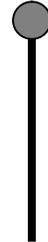
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa **pendidikan** diberi tempat khusus karena pewarisan tanggung jawab dan nilai-nilai hidup diteruskan dan dilestarikan baik dalam hubungan dengan alam, sesama manusia maupun dengan Tuhannya. Kearifan setempat orang Arso di Kabupaten Keerom ini memperlihatkan bahwa kehidupan mereka ditata dan dibangun berdasarkan modal sosial yang kuat yang menghasilkan hidup yang lebih berhasil, produktif dan efisien serta efektif karena relasi-relasi hidup dibangun berdasarkan sikap saling percaya, tahu akan norma-norma hidup bersama. Memang dalam kenyataan sebenarnya sikap saling curiga masih dominan dalam kehidupan masyarakat Arso/Keerom karena dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan.

***Tiatiki*: Kearifan Lokal Masyarakat Pesisir Teluk Tanah Merah, Kabupaten Jayapura**

Wiklif Yarisetou dalam hasil studinya yang berjudul *Tiatiki* Konsep dan Praktek (2009), memperkaya khazanah pengetahuan antropologis kita, terkait dengan pengetahuan masyarakat setempat (*local knowledge*) yang pada umumnya tidak diperhitungkan sebagai salah satu kekuatan pembangunan masyarakat.

Menurut Yarisitetou (2009: 97-139), *Tiatiki* merupakan pengetahuan setempat masyarakat komunitas Senamai, Tablanusu, Tablasupa dan Maruawy di Kabupaten Jayapura, yang berfungsi sebagai sumber pengetahuan untuk melestarikan lingkungan pesisir dan laut. Beberapa kearifan kosmologi *Tiatiki* dapat menjadi sumber pengetahuan setempat dan juga pengetahuan bagi masyarakat lainnya karena hal-hal berikut.

Memahami *Tiatiki* sebagai sumber pengetahuan dan pengajaran setempat yang mengandung unsur hukum adat tentang batas dan hak-hak ulayat laut masyarakat. Hubungan antarkampung di daerah ini diatur antara lain melalui hukum adat ulayat laut dan pesisir yang meliputi kampung **Senamai, Tablanusu, Tablasupa** dan **Maruawy**. Akibatnya ialah setiap



orang dari kampung-kampung bertetangga ini mengetahui batas-batas ulayatnya masing-masing sehingga saling menjaga hubungan di antara mereka untuk tidak saling melanggar batas ulayat laut atau boleh bersama-sama berada di wilayah laut yang bebas (*beta nau*) sesuai dengan ketentuan hukum adat laut setempat. Bahkan mereka mengetahui dan saling menghormati di antara klen-klen dalam masing-masing kampung, karena setiap kampung mempunyai peran dan fungsi sebagai klen pengatur kehidupan di lingkungan laut dan demikian juga ada klen yang bertanggung jawab mengatur kehidupan di wilayah daratan.

Tiaitiki menjadi sumber pengetahuan masyarakat setempat tentang penggunaan alat penangkap ikan. Di sini *Tiaitiki* berfungsi sebagai alat kontrol masyarakat untuk melarang dan menganjurkan warga komunitas dari keempat kampung ini untuk menggunakan alat tangkap ikan sesuai dengan kebiasaan masyarakat agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya laut secara berlebih-lebihan. Dengan demikian penggunaan alat seperti “bom ikan”, tidak dibenarkan bahkan dilarang. Hal ini diatur dalam *Tiaitiki* agar sumber daya laut tidak menjadi masalah bagi orang-orang di keempat kampung tersebut di masa depan. Di samping itu masyarakat juga diajari bagaimana menggunakan waktu yang tepat untuk melaut dan apa yang harus diperhatikan ketika akan melaut, yakni hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan baik sebelum maupun sesudah melaut.

Tiaitiki juga mengatur tentang hak dan kewajiban anggota komunitas. Apa yang ditekankan *Tiaitiki* ialah bagaimana komunitas setempat secara arif dapat menjaga keseimbangan hidup mengelola dan menjalankan apa yang disebut hak dan kewajiban. Keseimbangan dan keharmonisan hidup tersebut terkait dengan hidup baik pribadi maupun kelompok dalam masyarakat atau komunitas kampung dalam mengelola sumber daya dan kehidupan di laut serta di darat. Selain itu, diatur pula bagaimana hak dan kewajiban anak laki-laki tertua dalam keluarga di mana ayahnya adalah seorang pimpinan adat yang disebut Ondowafi, termasuk bagaimana berhubungan dengan roh-roh leluhur. Menurut Yarisetou, kesadaran mengenai tanggung jawab melestarikan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang bersifat turun temurun.

Dari penjelasan tentang beberapa kearifan setempat seperti kearifan orang Dayak dan orang Arso/Keerom di atas dapat dicatat beberapa peran dari kearifan setempat yang dapat berfungsi. Sejalan dengan pengetahuan masyarakat dan praktek hidup sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Gomes, melalui tulisannya tentang *Transisi Perekonomian Orang Asli*, (dalam

Lim Teck Ghee & Alberto G. Gomes, *penyunting*, 1993: 19-22) menyatakan bahwa:

Orang-orang asli di hutan, sampai abad ke-19, merupakan satu-satunya komunitas yang ada untuk mengeksploitasi sebagian besar hutan Malaya. Sebagai orang-orang yang beradaptasi dengan hutan mereka juga merupakan satu-satunya komunitas yang dilengkapi dengan pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencari dan mengeksploitasi dengan bijaksana sumberdaya-sumberdaya dari zona-zona hutan subsisten mereka.

Kearifan setempat bagi orang Dayak, orang Arso/ Kerom dan masyarakat di teluk Tanah Merah Kabupaten Jayapura merupakan suatu kekuatan dan daya dorong bagi pembangunan di daerah. Kearifan setempat selalu berkaitan dengan *world view* masyarakat tentang hidup, persaudaraan, persekutuan, usaha dan pertukaran sosial dalam relasi yang seimbang antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Yang Ilahi. Senada dengan pernyataan di atas, Muller (2006: 151) menyatakan bahwa:

setiap kebudayaan menyediakan suatu kerangka orientasi yang memberi makna pada kehidupan manusia serta mengarahkan tingkah laku dan tindakan orang dari kebudayaan tersebut sebagai hasil dari proses sejarah yang panjang. Oleh sebab itu, setiap kebudayaan pada dasarnya tak tergantikan dan patut dilindungi, karena setiap budaya mempunyai unsur-unsur yang positif di satu sisi dan di sisi lain perlu disadari juga segi-segi negatifnya agar bisa terhindar dari romantisme budaya.

Jadi, menurut hemat saya kearifan setempat hendaknya dilihat sebagai tempat berpijak bagi masyarakat lokal menapaki hidupnya yang dibangun secara turun-temurun hingga saat ini demi keberlangsungan hidupnya. Artinya kearifan setempat harus dilihat sebagai suatu kekuatan yang mengandung prinsip moral dan pengetahuan tentang hidup.

Peran dan Fungsi Kearifan Lokal

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas maka dapat dirumuskan beberapa peran dan fungsi kearifan lokal masyarakat sebagai berikut.

Pertama, kearifan lokal berfungsi sebagai kekuatan **etika-moral** dan **spiritual** masyarakat. Dikatakan demikian karena sesuatu dikatakan benar atau salah, baik atau buruk semuanya merujuk pada prinsip dan nilai-nilai yang ada pada *world view* masyarakat tersebut. *Kedua*, kearifan lokal berfungsi sebagai sumber inspirasi pendidikan yang **pro-life**. Maksudnya kearifan

lokal yang pro-life mengandung sistem nilai dan sistem pengetahuan yang berpihak pada keberadaan berbagai sumber daya alam dan kehidupan semua makhluk hidup secara berkelanjutan. *Ketiga*, kearifan lokal berfungsi sebagai penjamin kehidupan ciptaan yang **integratif**. Kehidupan yang integratif ditandai oleh hubungan yang harmonis dan setara antarmanusia dengan manusia, manusia dengan alam serta yang tidak bersifat eksploitatif serta alienatif. Kesadaran akan hidup yang integratif juga merupakan representasi dari suatu pengakuan akan keterbatasan manusia di satu sisi dan sekaligus sebagai pengakuan akan ke-Ilahi-an Sang Pencipta alam semesta di sisi lain.

Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Pembangunan

Latar belakang refleksi mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan tidak bisa dilepas dari memaknainya sesuai dengan *world view* masyarakat setempat. Baik orang Dayak maupun orang Papua juga harus dilihat kearifannya terkait dengan *world view* setempat.

Secara khusus refleksi mengenai kearifan lokal sebagai modal sosial bagi pembangunan di Papua mau disoroti apa makna pandangan dunia yang hidup dan dihidupi oleh antara orang Keerom dan Orang-orang di Teluk Tanah Merah Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan diekspresikan dalam hidup sehari-hari mereka. Kearifan lokal sebagai bagian dari kultur setempat perlu dilihat kaitannya dengan keberadaan orang Papua sebagai bagian dari kultur masyarakat. Selanjutnya, sehubungan dengan pengertian tentang *world view*, kami menggunakan penjelasan Geertz. Dikatakan oleh Clifford Geertz (1973: 126-127) bahwa *world view* berkaitan dengan kultur atau budaya masyarakat. Dalam budaya tersebut ada aspek **moral** (dan aspek estetika) sebagai unsur yang bersifat evaluatif, yang biasanya disadari sebagai etika dalam suatu masyarakat dan ada pula aspek **kognitif** sebagai unsur yang esensial, yang biasanya disebut *world view*. Jadi yang dimaksud dengan *world view*, sebagaimana diuraikan dalam bukunya, *The Interpretation of Cultures*, (1973: 126-127), sebagai berikut : “*world view is their picture of the way things in sheer actuality are, their concept of nature, of self, of society*”.

Maksudnya, melalui *world view*, suatu masyarakat dapat menyatakan atau mengekspresikan cara pandang mereka tentang sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan konsep tentang alam, diri, dan masyarakat. Sejalan dengan pikiran Geertz, Karl J. Franklin (2007: 25), dalam tulisannya mengenai *Framework for a Melanesian World View*, menyatakan bahwa:

A world view consist of assumptions or interpretations that people or groups of people make in reference to the world around them. Underlying a world view are

sets of values that support its importance or usefulness, as well as certain moral principles that may guide it.

Dalam *world view* ada paham tentang nilai-nilai hidup, dan biasanya digunakan sebagai prinsip moral dan rujukan dalam bertingkah laku serta cara memandang dunia dan hidup. Ada sejumlah nilai hidup yang penting,²⁸ namun di sini akan dijelaskan beberapa nilai dasar dalam kehidupan orang Melanesia menurut Ennio Mantovani.

Selanjutnya, menurut Ennio Mantovani (dalam, Darrel Whiteman (ed.), 1984: 195-210), secara kultural orang Melanesia di berbagai daerah mempunyai kesamaan nilai-nilai hidup yang dikenal secara kultural berkaitan dengan sejumlah aspek kehidupan. Aspek-aspek yang amat bernilai bagi orang Melanesia adalah :

a. *Community*/Komunitas atau Persekutuan

Komunitas merupakan satu unsur penting dalam kehidupan orang Melanesia karena kelompok dapat memberikan dukungan baik fisik maupun emosional yang berarti bagi perjuangan seseorang atau kelompok. Maka di sini berlaku prinsip etika dalam kehidupan orang Melanesia sebagai berikut : (a). Apa yang baik bagi komunitas, secara etis itu baik. (b). Apa yang salah bagi komunitas, secara etis juga salah. (c). Apa yang berbeda bagi komunitas, secara etis pun berbeda. Jadi aspek persekutuan memperlihatkan adanya nilai kesadaran kolektif masyarakat sebagai satu kesatuan yang integratif dan sekaligus menentukan karena persekutuan dimaksud meliputi persekutuan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya.

b. *Life*/Kehidupan

Konsep 'kehidupan' dapat diartikan sama seperti konsep 'cinta'. Tindakan-tindakan masyarakat yang menunjukkan 'cinta' mengandung suatu nilai dan sikap batin yang dalam mengenai apa yang disebut 'kehidupan'. Dalam bahasa *Pidgin* intimitas dalam hubungan antarsesama kerabat sebagai wujud persaudaraan disebut

²⁸Nilai tentang tanah, klen, resiprositas, makanan, leluhur, ritual keagamaan, kepemimpinan, pendidikan, kompensasi dan kerja. Nilai-nilai hidup yang disebut Franklin lebih rinci dari apa yang disebut oleh Mantovani. Namun Franklin melihat bahwa nilai yang satu selalu berkaitan dengan nilai lainnya. Misalnya, tanah selalu berkaitan dengan klen dan leluhur. Demikian juga nilai-nilai lainnya. Ennio Mantovani ketika berbicara mengenai *relationship*, ia melihatnya dalam kaitan dengan berbagai aspek kehidupan.

'*gutpela sindaun*'. Sejalan dengan nilai dan prinsip di atas, Agus A. Alua (2004: 9-63), menyatakan bahwa nilai sentral orang Melanesia adalah 'kehidupan'. Ia mengutip Whiteman yang melihat pentingnya nilai kehidupan, dalam arti : kelangsungan hidup (*continuation of life*); perlindungan atas hidup (*protection of life*) dan perayaan atas kehidupan (*celebration of life*). Dengan demikian kehidupan yang ada dilihat oleh orang Melanesia sebagai kehidupan yang berlimpah.

c. *Relationship*/Hubungan Persaudaraan atau Kekerabatan

Bagi orang Melanesia, nilai lain yang penting ialah: (1) Relasi atau hubungan dengan leluhur. Leluhur merupakan bagian yang utuh dari kehidupan komunitas. Para leluhur secara eksistensial menjadi satu kesatuan sosial dengan orang yang masih hidup. Jadi leluhur adalah bagian dari komunitas yang masih hidup. (2) Relasi dalam komunitas merupakan unsur yang penting bagi orang Melanesia. Relasi antaranggota komunitas menandakan adanya kesatuan. Karena itu, relasi dengan sesama saudara dalam komunitas merupakan hal yang penting. Relasi dalam komunitas juga mengandaikan adanya hubungan yang dekat dengan leluhur. (3) Relasi dengan komunitas lain. Relasi dengan komunitas lain merupakan unsur penting karena secara esensial kehidupan ada dan berlangsung baik dalam komunitasnya sendiri maupun komunitas lainnya. Identitas seseorang sangat berkait erat dengan komunitas tertentu dan kehidupan bersama dibangun dalam hubungan antarkomunitas. (4) Relasi dengan lingkungan hidup secara menyeluruh. Hubungan dengan lingkungan hidup menjadi begitu penting karena hubungan tersebut merupakan simbol dari kesatuan yang utuh baik antara manusia dengan leluhur dan dengan roh-roh sebagai satu kekuatan dalam hidup. Oleh karena itu, bila terjadi hubungan yang tidak harmonis dengan lingkungan hidupnya, akan mengakibatkan seseorang sakit atau mati.

d. *Exchange*/Pertukaran

Bagi orang Melanesia nilai dan aktivitas pertukaran merupakan suatu nilai kehidupan yang manjur. Dengan demikian aktivitas pertukaran juga merupakan tanda persaudaraan dan kekuatan hubungan sosial di antara masyarakat Melanesia. Nilai pertukaran dalam masyarakat Melanesia bersifat *resiprokal* atau bersifat timbal balik. Pertukaran yang bersifat timbal balik tersebut merupakan kekuatan dalam

kehidupan orang Melanesia baik di lingkungan komunitas maupun antarkomunitas.

Secara kultural dan etik harus dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang disebutkan di atas mengandung nilai-nilai kehidupan, baik sebagai media individu dan komunitas bercermin maupun sebagai sumber pengetahuan etika hidup yang menentukan eksistensi seseorang dan komunitasnya, berinteraksi, bereskpresi dan bertingkah laku. Dengan kata lain kearifan hidup yang dibangun berdasarkan pengetahuan lokal yang dipunyai dan prinsip etika lokalnya dapat dikatakan sebagai modal sosial yang amat bermakna bagi pengembangan hidup masyarakat setempat secara berkelanjutan.

Sejalan dengan pikiran di atas, menurut Fukuyama, yang dikutip Robert M.Z. Lawang, (2005: 225-226), menyatakan bahwa fungsi kearifan lokal sebagai sumber kapital sosial atau modal sosial dapat mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat yang tidak dapat diragukan lagi. Untuk pengalaman Indonesia, Lawang melihat bahwa ada banyak kecenderungan menggunakan kearifan lokal untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi. Kearifan lokal dapat dikatakan berperan dan berfungsi sebagai modal sosial karena beberapa alasan.

Pertama, modal sosial sebagai bagian dari kehidupan sosial mempunyai sifat sosial karena di dalamnya terdapat **fungsi produksi** yang memberi kerangka acuan bagi usaha yang bersifat efektif dan efisien dan **fungsi sosial** mengandung struktur, relasi, kognitif dan yang asosiasi menuntut adanya kesadaran anggota akan hak, kewajiban dan harapan. Terkait dengan hal tersebut, dalam kearifan lokal juga terkandung fungsi produksi yang bersifat efektif dan efisien serta fungsi sosialnya. Pengalaman orang Dayak menggunakan sumpit, memungkinkan mereka bertindak efektif dan efisien karena hanya mengusahakan apa yang menjadi sasaran perburuan mereka atau hanya difokuskan pada hewan buruan yang mereka cari. Dengan demikian, para pria yang berburu akan memperoleh hasil sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan tidak bertindak eksploitatif dan membabi buta, karena mereka tahu bagaimana menggunakan sumpit sesuai dengan fungsinya. Adapun bagi orang Arso, kearifannya dapat dilihat antara lain dari tradisi mereka berburu, menangkap ikan di sungai atau menebang pohon. Semua kegiatan itu dilakukan terbatas pada wilayah hutan dan tanah milik klen atau keluarga dan semuanya diambil secukupnya hanya untuk digunakan oleh keluarga di kampung dan tidak bersifat eksploitatif. Hal tersebut disebabkan oleh orang Arso mengenal sistem pembagian tata

ruang tentang alam dan lingkungan tempat manusia beraktifitas dan mencari nafkah, sebagai berikut: *Na Numui* (dusun sagu), *Ma Disih* (hutan tempat berburu binatang), *Ma Mandap* (tempat berkebun) dan *Ubyagey* (kali atau telaga, tempat mencari dan menangkap ikan). Jika mereka melakukan kegiatan dan diperkirakan akan melewati daerah atau dusun milik orang lain, biasanya akan meminta izin terlebih dahulu. Demikian juga bila dalam keadaan tertentu kegiatan berburu di hutan ternyata melampaui dusun atau wilayah orang lain, sepulangnya di kampung akan diberitahu kepada pemilik hutan atau dusun yang telah dilanggar oleh yang melakukan perburuan tersebut. Hal ini dilatarbelakangi oleh pandangan dunia yang membentuk pola hidup mereka yang secara ekonomis bersifat subsisten sebagai pemburu dan peramu. (Gusbager, 2001: 6-7 dan Bdk. Boelaars, 1986: 23-34; Lihat juga, Purba, *Penyunting*, 2002: 44-52). Sikap menghargai hak milik orang lain, tidak boros dan tidak eksploitatif serta ramah lingkungan, merupakan kearifan masyarakat yang ada sejak dulu dalam tradisi hidup orang Arso/Keerom dan orang Papua pada umumnya yang hingga saat ini masih dipraktekkan di banyak tempat di Papua.

Kedua, kearifan masyarakat mengelola sumberdaya hutan subsistensi mereka juga terkait langsung dengan fungsi hutan sebagai pusat kehidupan **ekonomi**, yang juga sekaligus bermakna **sosial** dan **keagamaan** serta **pendidikan** yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan relasi di antara berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan demikian aktivitas subsistensi yang tidak boros dan tidak rakus serta tidak eksploitatif memungkinkannya tetap menghargai keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhannya. Upaya untuk mewariskan nilai-nilai hidup yang baik melalui sikap melestarikan alam dan memelihara serta mengembangkan hubungan **sosial** yang baik dengan orang lain, bagi orang Arso/Keerom dengan cara menata lingkungan hidupnya dan relasi sosialnya dengan alam, sesama dan Tuhan, serta penduduk pesisir pantai teluk Tanah Merah Kabupaten Jayapura dengan prinsip *Tiitiki* mengandung jaringan, norma dan kepercayaan yang menyebabkan individu atau kelompok dapat bertindak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan hidup bersama. Penduduk asli yang hidupnya dari pencaharian nafkah di hutan, dengan cara berburu, menangkap ikan dan memetik hasil hutan lainnya secukupnya saja serta berkebun berpindah-pindah merupakan suatu pengalaman dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencari dan mengeksploitasi dengan bijaksana sumberdaya-sumberdaya dari zona-zona hutan subsistensi mereka. Dengan kata lain kebiasaan setempat merupakan suatu prinsip dan kekuatan yang dapat



mengatasi berbagai persoalan atau masalah yang muncul di antara warga masyarakat.

Kearifan setempat bagi suatu komunitas masyarakat di suatu daerah seperti orang Dayak dan orang Arso/ Keerom dan komunitas pesisir di wilayah teluk Tanah Merah Kabupaten Jayapura, merupakan suatu kekuatan dan daya dorong bagi pembangunan yang berkelanjutan di daerahnya. Kearifan setempat selalu berkaitan dengan *world view* komunitas tersebut tentang hidup, persaudaraan, persekutuan dan pertukaran sosial dalam keseimbangan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Yang Ilahi.

Kearifan setempat mengandung prinsip moral dan pengetahuan tentang hidup (Bdk Keraf, 2006: 289-296). Pengabaian kearifan setempat berdampak pada konflik yang dapat menyebabkan masyarakat merasa terasing atau teralienasi dari berbagai aspek kehidupan dan menyebabkan penduduk asli menilai bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan politik dan ekonomi bagi para pendatang, orang kaya dan pemerintah saja. Menurut Kartodiharjo dan Jhamtani (*eds.*), 2006: 185-186), hal ini terjadi karena bertahun-tahun lamanya pengelolaan sumber daya alam di mana kearifan setempat ada di masyarakat, dianggap tidak ada. Mengapa demikian? Kearifan setempat biasanya dianggap “kuno” dan “tidak ilmiah”, dan proses pembangunan di Indonesia yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, dapat diidentikkan sebagai kesadaran baru yang hadir lepas dari budaya lokal atau kearifan setempat. Padahal dalam konteks setempat seperti di Papua hidup bersama selalu dibangun berdasarkan pentingnya nilai kehidupan, persekutuan atau komunitas, persaudaraan dan pertukaran.

Dilihat dari aspek makna, baik modal sosial maupun kearifan lokal, keduanya mempunyai nilai yang sesuai dengan apa yang terkandung dalam gagasan dasar pembangunan berkelanjutan (Renwarin, 2009: 44-48). Mengapa demikian? Menurut saya, sejumlah kriteria yang terdapat dalam modal sosial, dapat juga dilihat dalam kearifan lokal sebagaimana digambarkan di atas dalam pengalaman orang Dayak, orang Teluk Tanah Merah dan orang Keerom. Sejumlah kriteria yang ada dalam modal sosial seperti adanya kriteria yang terkait dengan unsur ekonomi, unsur struktur masyarakat, unsur relasi, unsur kognitif ada pula dalam prinsip-prinsip kearifan lokal. Selain itu, dalam kearifan lokal konsep saling percaya di antara anggota masyarakat satu sama lain, kepatuhan akan norma-norma dan terbangunnya jaringan hidup bersama di antara mereka bukanlah

sesuatu yang dibuat-buat tetapi hidup seiring dengan keberadaan komunitas tersebut. Dari perspektif ini dapat dikatakan bahwa kearifan lokal merupakan modal sosial yang sudah teruji keampuhannya menata perilaku masyarakat terkait dengan hajat hidup orang banyak bukan saja dalam lingkup masyarakat setempat namun juga berdampak luas bagi masyarakat lainnya. Hal tersebut dapat dilihat misalnya dari sumber daya kelautan yang terus tersedia secara memadai bagi banyak orang khususnya masyarakat pesisir di wilayah teluk Tanah Merah Kabupaten Jayapura karena prinsip *Tiaitiki* sebagai kearifan lokal dalam mengelola sumber daya laut.

Itulah sebabnya menurut saya merupakan suatu kearifan pula bila semua agen pembangunan dapat mempertimbangkan kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan karena di dalam kearifan lokal terkandung hak-hak dasar masyarakat dan manusia yang dapat melindungi manusia dari proses eksploitasi yang merusak keutuhan ciptaan dan dehumanisasi serta melindunginya dari berbagai ancaman sehingga setiap makhluk ciptaan dihormati sesuai dengan martabatnya.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan atas tulisan ini kami ingin menyampaikan beberapa pokok pikiran berkaitan dengan peran dan posisi kearifan lokal sebagai modal sosial dalam pembangunan di tengah masyarakat sebagai berikut.

Pertama, pembangunan yang digalakkan dalam berbagai bidang, memperlihatkan kecenderungan yang mengabaikan kearifan setempat yang sarat nilai hidup dan moral (Etika) sebagai modal sosial masyarakat.

Kedua, semua introduksi pembangunan yang dilakukan yang tidak berorientasi pada kearifan lokal sebagai modal sosial masyarakat merupakan suatu pelecchan bagi eksistensi dan martabat manusia masyarakat setempat.

Ketiga, pendekatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan karena bukan merupakan pendekatan yang bersifat eksploitatif tetapi justru merupakan pendekatan pembangunan yang lebih partisipatif dan emansipatif.

Keempat, dengan demikian paradigma pembangunan yang berbasis pada kearifan lokal sebagai modal sosial pembangunan masyarakat di Papua, merupakan implementasi pendekatan pembangunan yang bermakna pemberdayaan, keberpihakan dan perlindungan terhadap masyarakat setempat.



Daftar Rujukan

- Boelaars, J. 1986. *Manusia Irian, Dahulu, Sekarang dan di Masa Depan*, Jakarta: Gramedia.
- Field, John. 2010. *Modal Sosial* (Terj.), Bantul-Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fine, Ben. 2001. *Social Capital versus Social Theory, Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium*, London and New York: Routledge.
- Franklin, Karl J. 2007. "Framework for a Melanesian World View", dalam *Catalyst*, Volume 37, No. 1, Goroka: The Melanesian Institute for Pastoral and Socio-Economic Service, Inc., Papua New Guinea.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar, Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ghee, Lim Teck dan Alberto G. Gomes (*Penyunting*). 1993. *Suku-suku Asli dan Pembangunan di Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Goulet, Denis. 1995. *Development Ethics: A Guide to Theory and Practice*, New York & London: The Apex Press & Zed Books Ltd.
- Gusbager, Kondrat Rudolfus. 2001. *Ritus Inisiasi Yonggway dan Sebuah Pendekatan dalam Kehidupan Masyarakat Arso-Keerom*, Skripsi S-1, STFT Fajar Timur (Tidak diterbitkan).
- Hasbullah, Jousairi. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*, Jakarta: MR-United Press.
- Ife, Jim. 2002. *Community Development*, London: Longman.
- Kartodiharjo, Harjadi & Jhamtani Hira (ed.). 2006. *Politik Lingkungan dan Kekuasaan di Indonesia*, Jakarta-Singapura: Equinox Publishing.
- Keraf, Sonny A. 2006. *Etika Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Cetakan ketiga.

- Lawang, Robert M. Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*, Jakarta: FISIP UI Press, Cetakan Kedua.
- Malak, Stepanus. 2006. *Kapitalisasi Tanah Adat*, Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Muller, Johanes. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*, Jakarta: Gramedia, Pustaka Utama.
- Patay, Martin. 2005. *Peluang Yang Memperlemah Posisi Masyarakat Adat*, Jakarta: Yayasan Kemala, World Resources Institute, WVI-Indonesia Region Sahul Papua.
- Purba, Johny (ed.). 2002. *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Jakarta: Yayasan Obor.
- Tim SKP Dekenat Keerom. 2008. *Laporan Hasil Penelitian, Perkebunan Sawit dan Kesejahteraan Masyarakat Arso*, Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura.
- Togolo, Mel. 2005. "Institutional Integrity and Sustainable Economic Stability", dalam *Catalyst*, Volume 35, No. 2, Goroka Papua New Guinea: The Melanesian Institute for Pastoral and Socio-Economic Service, Inc.
- Yerisetou, Wiklif. 2009. *Tiaitiki, Konsep dan Praktek*, Kerjasama antara Arika & Pemerintah Kabupaten Jayapura, Jayapura: Arika Publisher.

